BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 236/PM.00.02/K.ST-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rkp.
Perihal : Imbauan

Poso, 1 November 2023

Yth, **Ketua/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu**
Tahun 2024 di Kabupaten Poso
(daftar terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses PemilihanUmum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. ISI SURAT

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) pada Tanggal 03 November 2023, Bawaslu Kabupaten Poso menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 492** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa : **"*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut :

   Pasal 43

   (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
   (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan :
      a. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dengan menggunakan metode :
         1. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dengannomor urutnya; dan
         2. Pertemuan terbatas;
      b. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh PartaiPolitik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memuat unsur ajakan;
      c. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh PartaiPolitik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri khusus, atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode :
         1. Penyebaran bahan yang menyerupai bahan Kampanye Pemilukepada umum;
         2. Pemasangan alat peraga yang menyerupai alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
         3. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu;
      d. Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan praktik politik uang dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik; dan
      e. Sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh PartaiPolitik Peserta Pemilu tidak dilakukan di tempat/lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
   (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik melalui metode pertemuan terbatas dilakukan setelah Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

   (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum sosialisasi dan pendidikan politik dilaksanakan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

   Pasal 16

(4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsikepada :
   a. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat provinsi; atau
   b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkatkabupaten/kota.

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

Pasal 26

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e. Media Sosial;
   f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
   g. rapat umum;
   h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
   i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 27 ayat** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yakni ***"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRDprovinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkanPasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang."***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 69** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yakni ***"Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan KampanyePemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)."***

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 79** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal- hal sebagai berikut :
   a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu ;

   b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan metode :
      1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;

2) Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   1) Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   3) Media Sosial.
   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai PolitikPeserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

e. Citra diri sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi:
   1) Nomor urut ; dan
   2) Foto/gambar.

f. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya :
   1) tempat ibadah;
   2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
   3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halamansekolah dan/atau perguruan tinggi;
   4) gedung milik pemerintah;
   5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
   6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso mengimbau :
   a. Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dilarang melakukan aktivitas kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November 2023 dalam metode kampanye apapun kecuali sosialisasi dan pendidikan politik di Internal Partai Politik.
   b. Peserta Pemilu dilarang melakukan penyebaran alat peraga kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November 2023;
   c. Peserta Pemilu diharapkan melakukan penertiban (menurunkan/ menanggalkan) secara mandiri alat peraga kampanye yang telah terpasang sebelum tanggal 04 November 2023 dan dapat memasang kembali pada masa kampanye yaitu mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024.
   d. Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 04 s.d 27 November 2023 dapat melakukan pemasangan alat peraga kampanye berupabendera di Kantor Partai Politik yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dan tidak dapat melakukan pemasangan alat peraga kampanye selain pada Kantor Partai Politik.
   e. Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Poso ke KPU Kabupaten Poso paling lambat3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 04 s.d 27 November 2023 akan melakukan upaya penertiban terhadap alat peraga kampanye yang terpasang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait secara berjenjang.

Demikian imbauan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. K e t u a

TTD

IFRAN HARDIANTO W. TADENE, SH

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Lampiran Surat :
Nomor : 236/PM.00.02/K.ST-09/11/2023
Perihal : Imbauan

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

SE – KABUPATEN POSO

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NasDem
6. PARTAI PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARUDA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
16. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso